



RENCANA KINERJA TAHUNAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026

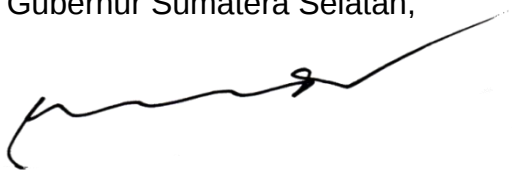
KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik sebagai sarana penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Perencanaan Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 melalui berbagai kegiatan tahunan sebagai bahan untuk mencapai Akuntabilitas Kinerja yang baik. Rencana Kinerja Tahunan ini memuat rencana capaian atau target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2026 ini. Semoga Rencana Kinerja Tahun 2026 yang kami susun ini dapat bermanfaat bagi terselenggaranya *Good Governance* pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 2026
Gubernur Sumatera Selatan,



H. Herman Deru

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Gambaran Umum 1

1.2. Profil Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 1

1.2.1. Kondisi Geografi 1

1.2.2. Kondisi Topografi 3

1.2.3. Kondisi Geologi 3

1.2.4. Kondisi Hidrologi 4

1.2.5. Kondisi Klimtologi 4

1.2.6. Kondisi Demografi 4

1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 5

1.4. Manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 6

1.5. Sistematika Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 6

BAB II KETERKAITAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA 7

2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 7

2.1.1. Keterkaitan RKT dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan... 7

2.1.2. Keterkaitan RKT dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 8

2.1.3. Keterkaitan RKT dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 10

2.1.4. Keterkaitan RKT Provinsi dengan RKT Kabupaten/Kota 11

2.1.5. Keterkaitan RKT dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) 11

2.1.6. Keterkaitan RKT dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 11

BAB III RENCANA KINERJA TAHUNAN 13

3.1. Ikhtisar Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Program, Kegiatan dan Anggaran 13

3.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan 15

3.3. Prioritas Pembangunan Daerah 17

3.4. Anggaran Pendukung Kinerja Prioritas Daerah 20

3.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 29

BAB V PENUTUP 36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 3

Gambar 3.1. Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah 17

Gambar 3.2. Rangkaian Kegiatan Penyusunan RKT Tahun 2026 17

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023	2
Tabel 1.2.	Jumlah dan Distribusi Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024	5
Tabel 2.1.	Keterkaitan Prioritas Nasional RKP dengan Prioritas Daerah RKT Tahun 2026	10
Tabel 2.2.	Keterkaitan Target Indikator Makro Provinsi dan Nasional Tahun 2026.....	12
Tabel 3.1.	Realisasi Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022-2025	13
Tabel 3.2.	Realisasi Anggaran dan Proyeksi Belanja Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022-2025	14
Tabel 3.3.	Realisasi Anggaran dan Proyeksi Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021-2025	14
Tabel 3.4.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026	15
Tabel 3.5.	Isu Strategis dan Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026	18
Tabel 3.6.	Target Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 disusun agar dapat lebih meningkatkan keberhasilan Akuntabilitas Kinerja yang ingin dicapai dalam melaksanakan aktivitas pelayanan terhadap publik. Proses pencapaian Kinerja Tahunan merupakan wahana untuk membuat dan melaksanakan strategi-strategi yang lebih terperinci dimasa yang akan datang guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas jalannya pemerintahan. Untuk itu Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai pelaksanaannya telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kinerja Tahunan 2026 ini memuat rencana capaian atau target kinerja untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada. Target yang disusun telah menjadi komitmen kami untuk dijadikan Target Kinerja dalam periode tahun 2026 yang tentu saja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

1.2. Profil Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

1.2.1. Kondisi Geografi

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai posisi geografis terletak antara 10^o 25' 13" sampai 4^o 55' 17" Lintang Selatan dan antara 102^o 3' 52" dan 106^o 19' 45" Bujur Timur, yang berbatasan dengan provinsi lain di Pulau Sumatera, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, di sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, di sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung dan di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Secara Geografis Provinsi Sumatera Selatan memiliki letak yang strategis, daerah pantai timur merupakan jalur pelayaran dengan potensi maritim. Posisi geografis ini menyebabkan Provinsi Sumatera Selatan dialiri oleh banyak sungai-sungai besar dan kecil. Letak geografis Provinsi Sumatera Selatan secara umum sangat menguntungkan untuk dijadikan sebagai pelabuhan yang menjadi konektivitas wilayah Sumatera Selatan dengan wilayah lainnya baik sebagai sarana transportasi maupun jalur perdagangan.

Selain itu kondisi geografis ini juga menyebabkan adanya sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam, batubara, dan lahan budidaya pertanian berupa lahan basah, perkebunan dan hutan.

Dengan luas wilayah yang mencapai 86.771,864 km², Sumatera Selatan berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036. Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 17 (tujuh belas) kabupaten dan kota, yang terbagi atas 13 (tiga belas) kabupaten dan 4 (empat) kota serta 241 kecamatan, 2.855 desa dan 403 kelurahan. Dengan Kota Palembang sebagai ibukota Provinsi.

Jika dilihat dari luas wilayahnya maka Kabupaten yang terluas di Provinsi Sumatera Selatan adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) seluas 17.071,333 Km² dan disusul oleh Kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) seluas 14.550,788 Km². Sedangkan luas wilayah terkecil di Provinsi Sumatera Selatan adalah Kota Palembang seluas 352,506 Km² dan Kota Lubuk Linggau seluas 367,726 Km².

Tingkat kepadatan penduduk Sumatera Selatan tahun 2025 sebesar 99,77 jiwa per Km². Kabupaten/ kota di Sumatera Selatan yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi adalah kota Palembang dengan kepadatan penduduk sebesar 4.680,72 jiwa per Km². Kemudian disusul oleh kota Lubuk Linggau dengan kepadatan penduduk sebesar 503,55 jiwa per Km² dan kemudian Kota Pagar Alam dengan kepadatan penduduk sebesar 399,94 jiwa per Km². Untuk Kabupaten/ Kota dengan kepadatan penduduk terendah adalah kabupaten Musi Rawas Utara dengan kepadatan penduduk sebesar 32,38 jiwa per Km².

Tabel 1.1.
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Jumlah Desa/Kelurahan dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

No	Kode ^a	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Km ²) ^a	Jumlah		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) ^b
				Kec	Kel/Desa	
1	16.01	Ogan Komering Ulu	3.774,50	13	157	102,48
2	16.02	Ogan Komering Ilir	17.071,33	18	327	47,83
3	16.03	Muara Enim	6.763,91	22	256	95,79
4	16.04	Lahat	4.333,07	24	377	105,14
5	16.05	Musi Rawas	6.122,59	14	199	67,90
6	16.06	Musi Banyuasin	14.550,79	15	242	45,31
7	16.07	Banyuasin	12.626,76	21	313	73,18
8	16.08	OKU Timur	3.412,72	20	332	155,65
9	16.09	OKU Selatan	4.369,25	19	259	127,40
10	16.10	Ogan Ilir	2.302,86	16	241	191,58
11	16.11	Empat Lawang	2.234,10	10	156	156,20
12	16.12	PALI	1.842,56	5	71	112,90
13	16.13	Muratara	5.937,80	7	89	33,82
14	16.14	Palembang	352,51	18	107	4.907,22
15	16.15	Pagar Alam	625,91	5	35	240,50

No	Kode ^a	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah (Km ²) ^a	Jumlah		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²) ^b
				Kec	Kel/Desa	
16	16.16	Lubuk Linggau	367,73	8	72	677,27
17	16.17	Prabumulih	477,31	6	37	460,32
		Sumatera Selatan	86.771,684	241	3.283	102,90

Sumber: ^a Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau; dan ^b Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2025

Gambar 1.1. Peta Wilayah Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : geoportal.sumselprov.go.id, 2017

1.2.2. Kondisi Topografi

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai topografi yang bervariasi mulai pegunungan di bagian Barat dengan ketinggian rata-rata antara 900-1200 mdpl yang merupakan pegunungan Bukit Barisan. Sedangkan di bagian tengah merupakan wilayah landai atau dataran rendah yang luas. Bagian Timur merupakan daerah pantai dan wilayah pesisir yang terdiri dari rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Panjang Kawasan Pesisir di Provinsi Sumsel ± 450 Km dari Sungai Benu (batas Provinsi Jambi) sampai Sungai Mesuji (batas Provinsi Lampung).

1.2.3. Kondisi Geologi

Sumatera Selatan menempati cekungan belakang busur Paleogen yang dikenal sebagai Cekungan Sumatera Selatan di bagian timur, dan mendala busur vulkanik yang membentang secara regional di sepanjang Bukit Barisan bagian barat. Batuan yang mendasari Cekungan Sumatera Selatan merupakan kompleks batuan berumur pra-tercier, yang terdiri dari batu gamping, andesit, granodiorit, pilit, kuarsit dan granit. Jenis

batuan yang terdapat di Sumatera Selatan adalah (1) formasi Lahat terdiri dari endapan tufa, aglomerat, breksi tufan, andesit, serpih, batu lanau, batu pasir dan batubara; (2) formasi Talang Akar terdiri dari batu pasir berukuran butir kasar-sangat kasar, serpih, batu lanau dan batubara; (3) formasi Baturaja terdiri dari batu gamping terumbu, serpih gampingan dan napal atau batu lempung gampingan; (4) formasi Baturaja terdiri dari serpih gampingan dan serpih lempungan; (5) formasi Air Benakat dengan penyusun utama batu pasir; (6) formasi Muara Enim terdiri dari batu pasir, batu lanau, batu lempung dan batubara; dan (7) formasi Kasai terdiri dari batu pasir tufaan dan tufa.

1.2.4. Kondisi Hidrologi

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah kaya sumber daya air dengan sumber air utama dari Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering dan Sungai Lematang. Persediaan air di wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya sangat tergantung dari sungai- sungai utama, yakni Sungai Musi dan anak-anak sungainya. Keberadaan air permukaan di wilayah WS Musi juga dipengaruhi keberadaan lebak, embung dan rawa. Sebagian besar wilayah merupakan dataran aluvial sehingga ketinggian tanahnya relatif seragam. Kondisi yang datar demikian menyebabkan pengaturan air kurang lancar sehingga timbul daerah genangan pada wilayah yang ketinggiannya hampir sejajar sungai. Lebak yang berada di wilayah ini fluktuasi luasannya sangat tinggi bila dibandingkan antara musim penghujan dan musim kemarau.

1.2.5. Kondisi Klimatologi

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan per hari 61,0/17- 634,4/22 mm sepanjang tahun. Setiap bulan hujan cenderung turun dan bulan November merupakan bulan dengan curah hujan paling banyak. Provinsi Sumatera Selatan memiliki suhu yang cenderung panas berkisar antara 26,4°C hingga 27,8°C dengan rata-rata suhu udara sekitar 26,8°C. Suhu terendah/minimum terjadi pada bulan Agustus, sedangkan suhu tertinggi/maksimum terjadi pada bulan Juni, dimana merupakan salah satu pemicu timbulnya hotspot (titik api) yang menjadi faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan. Sedangkan kelembapannya bervariasi antara 81 sampai dengan 88 persen.

1.2.6. Kondisi Demografi

Pada tahun 2025 total jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 8.928.515 jiwa yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota. Jumlah penduduk terbesar berada di Kota Palembang sebesar 1.729.843 jiwa dan terkecil di Kota Pagar Alam dengan jumlah penduduk sebesar 150.533 jiwa.

Tabel 1.2.
Jumlah dan Distribusi Penduduk Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2021-2025

KABUPATEN/ KOTA	Jumlah Penduduk Tahun				
	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*
Ogan Komering Ulu	372.272	376.977	379.130	383.039	386.816
Ogan Komering Ilir	740.346	767.821	797.429	807.085	816.505
Muara Enim	615.720	630.809	633.779	640.962	647.936
Lahat	435.419	436.489	444.949	450.281	455.581
Musi Rawas	410.210	414.009	407.694	411.787	415.744
Musi Banyuasin	651.861	688.969	644.386	651.950	659.302
Banyuasin	824.551	837.062	874.210	885.902	897.425
OKU Timur	655.703	673.966	668.035	429.535	680.094
OKU Selatan	417.424	418.040	424.190	674.184	434.789
Ogan Ilir	428.108	431.558	431.043	436.141	441.183
Empat Lawang	335.024	335.506	342.178	345.641	348.974
PALI	200.855	204.473	202.681	205.384	208.032
Musi Rawas Utara	194.799	195.475	195.962	198.413	200.799
Palembang	1.704.538	1.754.437	1.706.371	1.718.440	1.729.843
Pagar Alam	147.640	148.264	147.836	203.312	150.533
Lubuk Linggau	232.739	237.576	242.976	149.199	249.054
Prabumulih	198.605	203.643	200.673	246.046	205.905
Sumatera Selatan	8.565.814	8.755.074	8.743.522	8.837.301	8.928.515

Sumber: *Badan Pusat Statistik; Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2025

1.3. Maksud dan Tujuan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilakukan secara partisipatif merupakan wahana untuk mencapai kesepakatan dan memantapkan komitmen satuan kerja. Untuk itu kinerja harus memuat spesifikasi yang jelas dan dapat dijadikan sebagai dasar akuntabilitas atas prestasi yang telah disepakati dalam Komitmen Kinerja (Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja).

Para pimpinan satuan kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya dituntut profesional dalam melaksanakan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, akan tetapi juga dituntut lebih akuntabel, dalam pengertian tidak hanya memenuhi standar atau spesifikasi dalam komitmen kinerja, tetapi lebih jauh dari itu, sepanjang sumber daya yang dipercayakan kepadanya dapat digunakan lebih efektif dan efisien lagi.

Suatu tujuan dalam misi tersebut dalam praktiknya dicapai dengan usaha-usaha dari beberapa satuan kerja. Oleh karena itu, pimpinan satuan kerja harus dibebani tanggung jawab untuk memenuhi target-target kinerja yang tertuang di dalam RKT, dan diimbangi dengan pemberian kewenangan dan sumber daya yang memadai.

1.4. Manfaat Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan 2026 mempunyai manfaat sebagai berikut :

- 1) Menghubungkan RPJMD, rencana tindak, maupun perencanaan operasional yang terinci;
- 2) Menajamkan dan mengoperasionalkan rangkaian perencanaan sampai penganggaran;
- 3) Memudahkan melakukan pengukuran kinerja;
- 4) Memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja, melancarkan mekanisme umpan balik peningkatan kinerja;
- 5) Memudahkan manajemen dalam menetapkan beban atau target pada unit kerja;
- 6) Memudahkan dalam membantu spesifikasi kontrak untuk pembayaran kepada pihak yang diberi pekerjaan berdasarkan pencapaian kinerja.

1.5. Sistematika Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan wahana untuk membuat dan melaksanakan strategi-strategi yang lebih rinci. Untuk itu, target kinerja yang telah ditetapkan harus diterapkan dalam proses manajemen pemerintahan sehari-hari. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, menjabarkan maksud dan tujuan, manfaat penyusunan dan penyampaian RKT Tahun 2026 serta Sistematika RKT.
- Bab II : Keterkaitan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.
- Bab III : Rencana Kinerja Tahunan, menjelaskan ikhtisar tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, program, kegiatan dan anggaran Tahun 2026.
- Bab IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Rencana Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

BAB II

KETERKAITAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

2.1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rencana pembangunan tahunan daerah untuk jangka waktu satu tahun. RKT merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan. RKT disusun dengan berpedoman pada RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKT sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah sebagai upaya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sesuai dengan kewenangannya maka, pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan prinsip yang meliputi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan bersama dengan pemangku kepentingan berdasarkan peranan dan kewenangan masing-masing, terintegrasi dengan rencana tata ruang dan melaksanakan sesuai dengan kondisi daerah serta dinamika daerah dan nasional.

Dalam prosesnya perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis atas bawah dan bawah atas. Selain itu terkait dengan substansi maka perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan Tematik Holistik, Integratif dan Spasial yang lebih dikenal dengan istilah (THIS).

Untuk menyusun rencana pembangunan daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan. RKT yang sudah ditetapkan menjadi acuan dalam penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah dan sebagai bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.1.1. Keterkaitan RKT dengan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan periode 2025-2029. Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, isu strategis daerah Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan Stunting masih tinggi.
2. Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan belum optimal.
3. Layanan Pendidikan dan Kesehatan belum optimal.
4. Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas belum optimal.
5. Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan, Lahan, Banjir dan Tanah Longsor belum optimal.
6. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi belum optimal.
7. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam mendorong Pengembangan Wilayah.
8. Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan.
9. Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial.

2.1.2. Keterkaitan RKT dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

Penyusunan RKT Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional, RTRW Wilayah Sumatera dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, pengembangan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang terdiri dari kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Adapun kebijakan pengembangan struktur ruang yaitu :

1. Menciptakan keterpaduan sistem perkotaan,
2. Pengembangan infrastruktur utama wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah untuk terwujudnya sistem kota-kota di Provinsi Sumatera Selatan,
3. Pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi pendorong pengembangan wilayah,
4. Mendorong terlaksananya peran Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dalam mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk.

Sementara itu kebijakan pengembangan pola ruang, meliputi Kebijakan pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kebijakan pengembangan kawasan lindung, meliputi:

1. Memantapkan fungsi kawasan lindung pada kawasan yang memenuhi kriteria kawasan lindung,
2. Menjaga dan meningkatkan kualitas kawasan lindung.

Sementara itu Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi:

1. Meningkatkan produktivitas lahan tidur atau lahan non produktif serta meningkatkan produktivitas pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan guna menjaga ketahanan pangan dan menjadikan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan nasional,
2. Mengoptimalkan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam guna mendorong pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah yang belum berkembang karena keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan,
3. Meningkatkan fungsi kawasan budidaya untuk pertahanan dan keamanan.

Sinkronisasi dan sinergi RKT dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan di wilayah Sumatera Selatan dapat lebih terarah serta mampu mendorong percepatan pembangunan wilayah. Selain itu, sinkronisasi dan sinergi RPJMD dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan juga diarahkan:

1. Mewujudkan ruang wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat;
2. Memberikan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
3. Meningkatkan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
4. Meningkatkan keterpaduan perencanaan tata ruang kabupaten/kota dengan wilayah nasional dan provinsi;
5. Mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
6. Mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; serta
7. Menjaga keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah serta keserasian kegiatan antar sektor dan antar Perangkat Daerah.

Dalam menyusun RKT, selain berpedoman pada RTRWP, juga perlu memperhatikan RTRW Nasional. Hal ini untuk melihat posisi Provinsi Sumatera Selatan dalam tataran perencanaan ruang di tingkat nasional. Beberapa wilayah Sumatera

Selatan dalam konstelasi tata ruang nasional masuk ke dalam Pusat Kawasan Nasional, Pusat Kawasan Wilayah dan Kawasan Andalan.

Selain itu RKT Sumatera Selatan mencoba melihat arahan RTRW daerah/provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini adalah Provinsi: Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung. Telaah terhadap RTRW provinsi yang berbatasan tersebut diarahkan untuk:

1. Tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antarprovinsi;
2. Keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi dan kabupaten/kota;
3. dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

2.1.3. Keterkaitan RKT dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Penyusunan RKT Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 mengacu pada dokumen RKP 2026 terutama menyangkut prioritas, sasaran dan arah kebijakan. Keterkaitan RKT Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026 menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan kebijakan Pemerintah Pusat seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Keterkaitan Prioritas Nasional Tahun 2025-2029
dengan Prioritas Daerah RKT Tahun 2026

PRIORITAS NASIONAL 2025-2029	PRIORITAS DAERAH (RKT)
1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	• Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	• Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat
3.	• Ketangguhan daerah dengan mendorong ketahanan pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

PRIORITAS NASIONAL 2025-2029	PRIORITAS DAERAH (RKT)
4. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	- Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat - Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan
5. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	Kualitas SDM yang berdaya saing melalui peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, keterampilan, peran perempuan, pemuda, keluarga dan penyandang disabilitas
6. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	- Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat - Kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan
7. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan Ramah Lingkungan
8. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas
9. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi, berorientasi pada kearifan lokal

Prioritas Daerah Tahun 2025-2029 tersebut disusun berdasarkan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, hasil evaluasi kinerja RKT Tahun 2024, target RKP Tahun 2026 serta mempertimbangkan situasi terkini sehingga didapat 7 (tujuh) isu strategis yaitu:

1. Perlindungan sosial dan pemberdayaan peningkatan pendapatan masyarakat belum optimal;
2. Hilirisasi sektor unggulan daerah belum optimal;

3. SDM berbasis kompetensi belum optimal;
4. Kinerja pelayanan publik berbasis digital belum optimal;
5. Akses, Kualitas, dan Kuantitas Infrastruktur Layanan Pendidikan dan Kesehatan belum optimal;
6. Infrastruktur Wilayah dan Infrastruktur Dasar belum optimal; dan
7. Pengelolaan SDA dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung.

Tabel 2.2

Keterkaitan Target Indikator Makro Provinsi dengan Nasional Tahun 2026

INDIKATOR MAKRO	NASIONAL	PROVINSI
% Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,0 – 6,4	5,8 – 6,3
PDRB per Kapita (ADHB)	n/a	94,00
Kontribusi PDRB Provinsi	n/a	3,09
Tingkat Kemiskinan	9,07-10,07*	9,07-10,07*
Rasio Gini	0,304-0,307	0,312 - 0,316*
Indeks Modal Manusia	n/a	0,5475
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	68,68*	65,48-68,68
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	n/a	68,44
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,29-3,83	3,75 – 3,90

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2026

Keterangan: a) Kesepakatan pada Pembahasan Rakortekrenbangnas Penyusunan RKP Tahun 2026

Tabel diatas menunjukkan target indikator makro Provinsi yang harus dicapai di tahun 2026 untuk mendukung capaian nasional.

2.1.4. Keterkaitan RKT Provinsi dengan RKT Kabupaten/Kota

Capaian pembangunan Provinsi Sumatera Selatan pada dasarnya adalah akumulasi dari capaian pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota. Oleh karena itu sinergitas perencanaan pembangunan yang disusun di tiap tingkatan menjadi sangat penting untuk mencapai target-target pembangunan.

2.1.5. Keterkaitan RKT dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

RKT tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berwawasan tahunan. Renja PD merupakan penjabaran teknis RKT yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi BAPPEDA Provinsi Sumatera Selatan.

2.1.6. Keterkaitan RKT dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

RKT menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA serta PPAS. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disusun berdasarkan RKT diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. Rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun 2026. Penyusunan RKT dan KUA PPAS menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sehingga proses perencanaan hingga pencairan APBD telah menggunakan 1 sistem terpadu.

BAB III
RENCANA KINERJA TAHUNAN

3.1. Ikhtisar Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Program, Kegiatan dan Anggaran

Pada tahun 2026 struktur APBD Provinsi Sumatera Selatan jumlah anggaran Pendapatan ditetapkan sebesar Rp.7.368.627.067.617,27,- dan jumlah anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 7.657.938.144.305,- yang terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp. 4.598.501.345.925,- ; Belanja Modal sebesar Rp, 949.270.874.438-; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.200.000.000.000,- dan Belanja Transfer sebesar Rp.1.910.165.923.942,- yang tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Realiasi Anggaran dan Proyeksi Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2023 – 2026

No	Uraian	2023	2024	2025	2026
		Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)
1	PENDAPATAN	9.547.779.371.502,99	10.962.497.244.934,50	10.060.185.345.574,40	11.175.807.580.572,80
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.875.950.557.289,99	5.309.757.143.255,46	4.459.311.556.974,42	4.819.449.619.379,62
A	Pendapatan Pajak Daerah	4.287.466.538.999,46	4.744.634.642.741,87	3.739.026.143.140,42	4.012.860.825.379,52
B	Pendapatan Retribusi Daerah	12.477.067.295,00	8.552.046.241,00	5.213.358.400,00	5.536.107.400,00
C	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	223.885.947.856,00	138.824.929.544,35	173.213.785.400,00	148.10.513.275,00
D	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	352.121.003.139,53	417.745.524.728,24	541.858.000.000,00	652.945.173.325,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.667.946.127.537,00	5.648.721.133.679,00	5.597.130.535.600,00	6.352.173.149.473,18
A	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.667.946.127.537,00	5.648.721.133.679,00	5.200.304.650.600,00	5.367.705.341.310,00
A.1	Dana Perimbangan	4.667.946.127.537,00	5.648.721.133.679,00	5.200.304.650.600,00	5.361118.708.915,00
A.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	1.854.967.347.879,00	2.645.802.349.840,00	765.459.964.000,00	895.310.741.220,00
A.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-	1.478.848.909.000,00	1.305.822.895.300,00
A.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.653.766.188.000,00	1.806.673.215.634,00	1.750.244.931.000,00	1.791.801.092.580,00
A.1.4.1	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.159.212.591.658,00	1.189.620.027.205,00	1.205.750.845.600,00	1.368.183879.815,00
A.2	Dana Insentif Daerah	-	6.625.541.000,00	-	6.586.623.395,00
B	Kurang Salur DBH dan Pajak	-	-	396.825.885.001,00	984.467.808.163,18
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	3.882.686.676,00	4.018.968.000,00	3.743.253.000,00	4.184.811.720,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	3.882.686.676,00	4.018.968.000,00	3.743.253.000,00	4.184.811.720,00
1.3.2	Dana Penyesuaian Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-

Sumber: TAPD Provinsi Sumatera Selatan, 2025 (data diolah)

Tabel 3.2.
Realiasi Anggaran dan Proyeksi Belanja Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2023 – 2026

No	Uraian	2023	2024	2025	2026
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)
2.	BELANJA DAERAH	9.698.252.360.233,98	10.899.989.950.243,70	10.349.496.422.262,00	11.284.302231.780,00
1.	BELANJA OPERASI	4.975.235.925.372,77	5.311.081.939.178,72	5.557.243.851.496,00	6.144.844.195.355,00
A.	Belanja Pegawai	2.190.116.137.939,00	2.528.391.380.267,00	2.731.880.497.202,00	3.333.057.936.012,00
B.	Belanja Barang dan Jasa	2.405.532.045.847,87	2.259.380.999.928,72	2.410.319.440.644,00	2.363.919.482.520,00
C.	Belanja Bunga	8.817.133.280,00	2.786.684.555,00	-	-
D.	Belanja Subsidi	-	510.541.824.428,00	5.000.000.000,00	3.350.000.000,00
E.	Belanja Hibah	370.770.608.305,90	9.981.050.000,00	407.043.913.650,00	444.516.776.823,00
F.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	Belanja Biaya Provinsi Pengelolaan Pinjaman	-	-	-	-
2.	BELANJA MODAL	1.206.711.898.808,99	1.292.420.009.833,96	1.383.913.715.467,00	1.271.633.562.637,00
A.	Belanja Tanah	1.743.753.503,00	701.091.753,00	4.419.000.000,00	2.910.000.000,00
B.	Belanja Peralatan dan Mesin	345.465.230.996,00	282.043.992.981.,25	315.057.021.819,00	355.212.329.396,00
C.	Belanja Gedung dan Bangunan	266.624.790.389,12	259.121.500.988,71	428.370.418.326,00	322.077.058.402,00
D.	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	541.178.479.003,87	699.082.171.086,00	555.925.433.822,00	545.486.550.245,00
E.	Belanja Aset Tetap Lainnya	50.703.578.417,00	48.066.059.521,00	73.450.541.500,00	39.272.483.100,00
F.	Belanja Aset Lainnya	996.066.500,00	3.405.193.804,00	6.691.300.000,00	6.678.141.494,..
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.000.000.000,00	82.301.295,00	50.000.000.000,00	270.421.980.137,00
4.	BELANJA TRANSFER	3.500.304.536.052,22	4.296.405.699.936,00	3.361.338.855.299,00	3.597.402.793.651,00
A.	Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota	2.179.118.758.571,00	2.399.428.901.098,00	1.627.156.556.949,00	1.982.610.588.683,00
B.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Daerah	1.321.185.777.481,22	1.896.976.798.838,00	1.734.182.298.350,00	1.614.791.904.968,00

Sumber: TAPD Provinsi Sumatera Selatan, 2025 (data diolah)

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2026 di proyeksikan sebesar
Rp.108.494.551.207,-.

Tabel 3.3.
Realiasi Anggaran dan Proyeksi Pembiayaan Provinsi Sumatera Selatan Tahun
Anggaran 2023 – 2026

No	Uraian	2023	2024	2025	2026
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	APBD (Rp)	Proyeksi (Rp)
3	PEMBIAYAAN	436.744.445.834,19	257.986.372.616,46	289.311.076.688,00	108.494.551.207,00
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	322.922.821.755,19	154.808.667.409,91	289.311.076.688,00	108.494.551.207,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	113.821.624.079,00	103.177.705.206.,55	-	-

Sumber: TAPD Provinsi Sumatera Selatan, 2025 (data diolah)

3.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, RKT Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, merupakan implementasi dari tahun kedua RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sekaligus sebagai penjabaran dari periode pertama RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD untuk periode ini sangat penting karena merupakan langkah lanjutan dalam mencapai target RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045.

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dan Inmendagri 2 tahun 2025, tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD, dalam hal ini RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Untuk itu, dalam penetapan sasaran pembangunan tahun 2026, RKT Provinsi Sumatera Selatan mengacu tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029. Adapun Tujuan dan Sasaran serta target yang akan dicapai pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

Prioritas Daerah/ Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Prioritas Daerah 1: Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas				
1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		1. Indeks Modal Mansia (IMM)	Indeks	0,5475
		2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74.95
		3. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	69,41 - 69,42
	1.1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Keterampilan SDM	1. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	9,27 - 9,29
		2. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,89-12,90
		3. Persentase kabupaten/ kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Literasi Membaca Numerasi	% %	8,82 – 13,23 1,47 – 7,35
		4. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: Literasi Membaca Numerasi	% %	93,34 54,11
		5. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang Mendapatkan Pekerjaan dalam Satu Tahun Setelah kelulusan	%	82,59
		6. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	73,50

Prioritas Daerah/ Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	1.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan	1. Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,71
		2. Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	13,80
	1.3. Meningkatnya Pembangunan Sektor Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	56,89
	1.4. Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	1. Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,453
		2. Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,99-94,10
		3. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66,00
Prioritas Daerah 2: Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat				
2. Meningkatnya Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah		1. PDRB per Kapita	Rp (Juta)	94,00
		2. Kontribusi PDRB Provinsi	%	3,09
		3. Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	%	1,42
		4. Indeks Entropy Theil	Indeks	1,28
		5. Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,50
		6. PDRB per Kapita	Rp (Juta)	94,00
	2.1. Meningkatnya Pengembangan Potensi Ekonomi Sektor Unggulan Daerah	1. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	2,82
		2. Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian	%	3,330
		3. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makanan dan Minuman	%	2,10
	2.2. Meningkatnya Investasi dan Perdagangan Daerah	1. Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PMTB)	%	31,16
		2. Persentase Pertumbuhan Investasi	Nilai	7,50
		3. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	13,99
		4. Ekspor Barang dan Jasa (PDRB %)	%	21,58
		5. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	%	7,00
		6. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	%	0,58
	2.3. Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	1. Tingkat Inflasi	%	1,5 – 3,5
		2. Inklusi Keuangan	%	94,93
		3. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,75
Prioritas Daerah 3: Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru				
3. Terwujudnya ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air		1. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	62,63
		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	21,99
	3.1. Meningkatnya Ketahanan Pangan, Energi,	1. Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	79,79
		2. Porsi EBT dalam bauran energi primer	%	23,70

Prioritas Daerah/ Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	dan Air	3. Rasio Elektrifikasi	%	100
		4. Persentase Desa Berlistrik	%	100
		5. Kapasitas air baku	m3/ detik	2,46
		6. Indeks Ketahanan Air Provinsi	Indeks	3,65
	3.2. Meningkatkan Pengembangan Hilirisasi Berbasis Sektor Unggulan	1. Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	19,53
		2. Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	%	5,16
		3. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	%	2,39
4. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan		1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	68,44
		2. Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	65,48-68,68
		3. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks	0,469
	4.1. Meningkatkan Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1. Persentas Penurunan Emisi GRK Kumulatif	%	19,41
		2. Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan	%	34,50
Prioritas Daerah 4: Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan				
5. Meningkatkan Kualitas Konektivitas Daerah		Rasio Konektivitas	%	0,660
	5.1. Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang Berkualitas	1. Waktu Tempuh Jalan Provinsi	jam/ 100 km	2,50
		2. V/C Rasio Jalan	Rasio	0,388
		3. Rata-Rata <i>Load Factor</i> Penumpang Angkutan Umum	%	71,50
6. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Masyarakat		Persentase Bangunan Gedung, Hunian dan Permukiman dengan akses layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	43,14
	6.1. Meningkatkan Akses Air Minum dan Sanitasi	1. Akses Air Minum Layak	%	90,35
		2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	82,43
		3. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan	%	38,00
	6.2. Meningkatkan Hunian dan Permukiman yang Layak	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	68,60
7. Meningkatkan Pengelolaan Bencana		Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Indeks	129,78
	7.1. Meningkatkan Upaya Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,40
Prioritas Daerah 5: Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan				
8. Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat		1. Tingkat Kemiskinan	%	9,07 - 10,07
		2. Rasio Gini	Indeks	0,312 - 0,316
	8.1. Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Berusaha	1. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,75-3,90
		2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	70,84
		3. Rasio Kewirausahaan	%	2,6

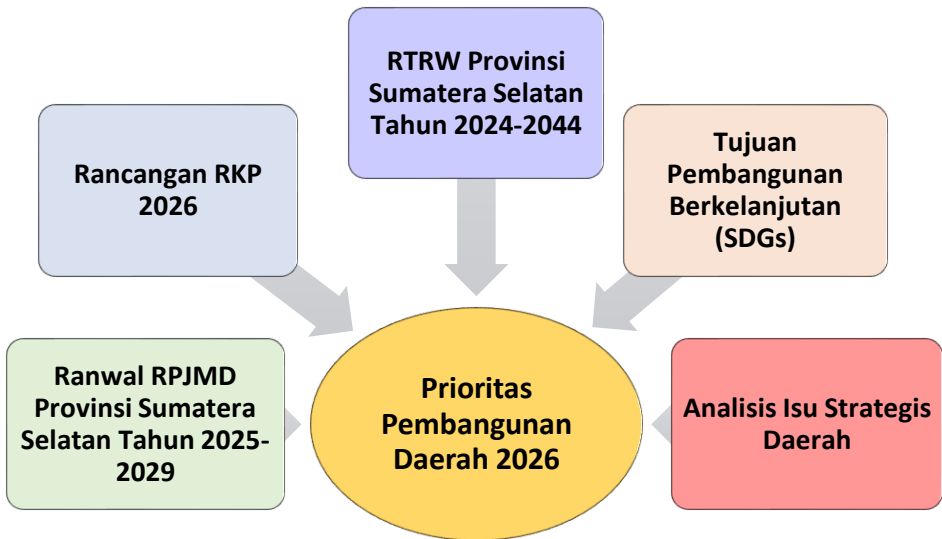
Prioritas Daerah/ Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
		4. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	%	0,42
	8.2. Meningkatnya Upaya Perlindungan Sosial	1. Persentase Kemiskinan Ekstrem	%	0,20
		2. Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,32
Prioritas Daerah 6: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas				
9. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (76-77)
	9.1. Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi	1. Nilai SAKIP	Indeks	BB (78,75)
		2. Opini BPK	Indeks	WTP
		3. Manajemen Risiko Indeks	Indeks	2,982
		4. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	Indeks	2,02 (Sedang)
		5. Indeks Integritas Daerah	Indeks	75,13
	9.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Pelayanan Publik	Indeks	A (4,65)
		2. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	6,08
Prioritas Daerah 7: Kehidupan Beragama, Seni dan Budaya Dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi Pada Kearifan Lokal				
10. Terwujudnya Stabilitas Sosial		Indeks Harmoni Indonesia (Sumatera Selatan)	Indeks	6,60
	10.1. Menguatnya Ketentraman di Masyarakat	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	78,15
		2. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	71,69
	10.2. Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	59,81

Sumber: RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

3.3. Prioritas Pembangunan Daerah

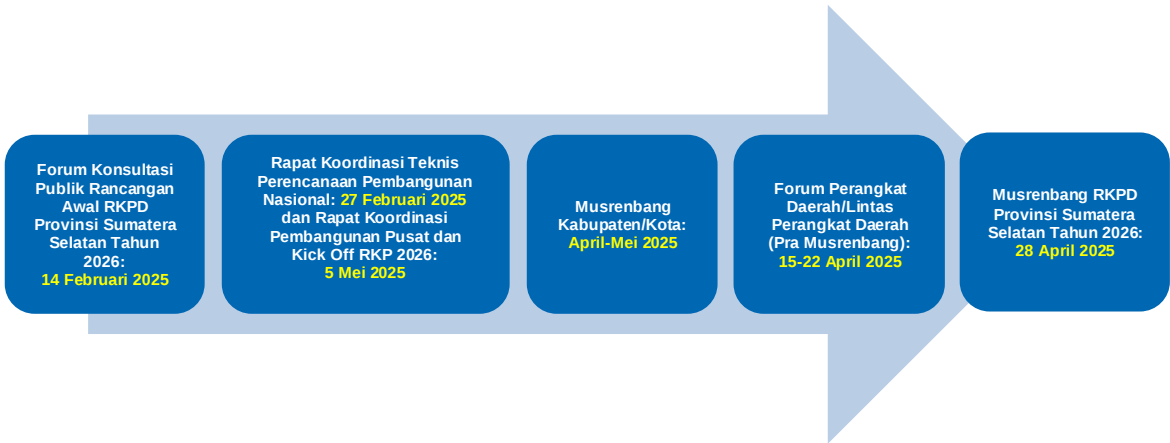
Dalam mencapai target pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026, perlu dilakukan perumusan prioritas pembangunan daerah yang bertujuan untuk memfokuskan rencana pembangunan di Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan dengan melakukan telaah RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, telaah RKP Tahun 2026, telaah RTRW Provinsi Sumatera Selatan, telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dan Analisis Isu Strategis Daerah sesuai gambar berikut:

Gambar 3.1.
Perumusan Prioritas Pembangunan Daerah



Untuk menentukan program, kegiatan, sasaran, indikator dan target maka dalam penyusunan Prioritas Daerah RKT tahun 2026, Pemerintah Provinsi melakukan serangkaian kegiatan sebagai berikut:

Gambar 3.2.
Rangkaian Kegiatan Penyusunan RKT Tahun 2026



Dengan mempertimbangkan arahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, Rancangan RKP Tahun 2026, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dan Isu Strategis Daerah, maka ditetapkanlah tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 yaitu **“Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang berkelanjutan melalui Penguatan Ketahanan Pangan, Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”** dengan 7 (tujuh) Prioritas Daerah RKT Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, yaitu :

1. Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas;
2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat;
3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
4. Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
5. Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan;
6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas;
7. Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal.

Adapun keterkaitan dan konsistensi antara isu strategis dan Prioritas Daerah RKT Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5.
Isu Strategis dan Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

Isu Strategis	Prioritas Daerah RKT 2026
Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Peningkatan Pendapatan Belum Optimal	PD5: Kesempatan Berusaha dan Lapangan Kerja serta Perlindungan Sosial yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan
Hilirisasi Sektor Unggulan Daerah Belum Optimal	PD2: Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat PD3: Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
SDM Berbasis Kompetensi Belum Optimal	PD1: Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas PD7: Kehidupan Beragama, Seni, dan Budaya dalam Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Toleransi dan Berorientasi pada Kearifan Lokal

Isu Strategis	Prioritas Daerah RKT 2026
Kinerja Pelayanan Publik Berbasis Digital Belum Optimal	PD6: Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi dan Akuntabilitas serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas
Akses, Kualitas, dan Kuantitas Infrastruktur Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal	PD1: Kualitas SDM yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga dan Penyandang Disabilitas
Infrastruktur Wilayah dan Infrastruktur Dasar Belum Optimal	PD4: Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
Pengelolaan SDA dengan Mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya Tampung	PD3: Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

Selanjutnya, selain mendukung Sasaran Pembangunan Prioritas Nasional, seluruh program daerah di dalam RKT Tahun 2026 yang mengacu berdasarkan Program Prioritas Daerah di RPJMD Tahun 2025 – 2029 diharapkan berkontribusi dalam mendukung Program Prioritas Nasional. Adapun sandingan keterkaitan Program Prioritas Nasional pada RKP dengan Program Prioritas Daerah pada RKT Tahun 2026 yang mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5.
Dukungan Program Daerah terhadap Program Prioritas Nasional RKP 2026

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/ Program Daerah RKT Tahun 2026	Indikator Program
PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	
PPN 1.1. : Memperkokoh Ideologi Pancasila	
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
PPN 1.2. : Penguatan Demokrasi	
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Berpolitik
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik
PPN 1.3. : Penegakan Hak Asasi Manusia	
Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi pengelolaan peraturan perundang-undangan pemerintah Provinsi/Kab/Kota, penyelesaian hukum, dan penyelenggaraan HAM yang dilaksanakan
Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif
Program Perlindungan Khusus Anak	- Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/ Program Daerah RKT Tahun 2026	Indikator Program
	- Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memapatkan Layanan Komprehensif
PN 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	
PPN 2.1. : Penguatan Sistem Keamanan Negara	
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakan - Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas - Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat
PPN 2.2. : Keamanan Siber, Sandi, dan Sinyal	
Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)
PPN 2.3. : Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Internasional	
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	- Efektivitas Kerjasama Daerah
PPN 2.4. : Swasembada Pangan	
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	- Produksi Tanaman Pangan - Luas Pengembangan Komoditi Tanaman Pangan
Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	- Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B - Luas Lahan Siap Tanam Padi
Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	- Persentase Penanganan Bencana Pertanian - Persentase Penanganan DPI terhadap Pertanian - Luas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Program penyuluhan pertanian	- Persentase Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan - Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase jumlah cadangan pangan
Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan
Program penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan
Program pengawasan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang memenuhi persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan
Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	- Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis - Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)
Program pengelolaan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/ Program Daerah RKT Tahun 2026	Indikator Program
Program pengelolaan perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Luasan Kawasan Konservasi
Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Angka Konsumsi Ikan
Program Pengelolaan Hutan	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB
Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati
PPN 2.5. : Swasembada Energi	
Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Porsi EBT dalam Bauran Energi
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi
PPN 2.6. : Swasembada Air	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Debit air baku yang dihasilkan
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai
PPN 2.7. : Ekonomi Syariah	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal
Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan
PPN 2.8. : Ekonomi Digital	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal
Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor
PPN 2.9. : Ekonomi Hijau	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (IPKH)
Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	- Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) - Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola
Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pegelolaan Sampah (IKPS)
Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	'Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional
PPN 2.10. : Pengembangan Ekonomi Biru sebagai Penhela Pertumbuhan Ekonomi (Prime Mover) dan Sumber Pertumbuhan Baru	
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB
Program pengelolaan pelayaran	Konektivitas Laut

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/ Program Daerah RKT Tahun 2026	Indikator Program
PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	
PPN 3.1. : Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur	
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah
PPN 3.2. : Mendorong Kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Dalam Negeri
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya - Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kab/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal
Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor
PPN 3.3. : Mengembangkan Industri Kreatif	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual
Program pemasaran pariwisata	- Jumlah wisatawan mancanegara - Jumlah wisatawan nusantara
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	- Angka Kumulatif Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan - Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan
PPN 3.4. : Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal
Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase Koperasi Aktif
Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan
Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas
Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam
PPN 3.5. : Pendalaman Sektor Keuangan	

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/ Program Daerah RKT Tahun 2026	Indikator Program
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Dana Transfer
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital
PN 4 : Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	
PPN 4.1. : Memperkuat Sistem Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	
Program pengelolaan pendidikan	- Persentase Angka Partisipasi Sekolah - Persentase SPM Pendidikan - Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) - Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus
Program Pengembangan Kurikulum	- Jumlah pengembangan Kurikulum - Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Persentase PTK berkualifikasi S-1 - Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	- Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) - Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan
Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kab/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja
Program Hubungan Industrial	Jumlah Pekerja Pada Perusahaan Yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya - Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
PPN 4.2. : Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi	
Program pengelolaan pendidikan	- Persentase Angka Partisipasi Sekolah - Persentase SPM Pendidikan - Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) - Persentase Anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus
Program Riset dan Inovasi Daerah	- Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan - Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan
PPN 4.3. : Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional	

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/ Program Daerah RKT Tahun 2026	Indikator Program
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Persentase kab/kota yang memiliki RS Pemerintah Daerah dengan Ketersediaan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sesuai standar - Angka Kematian Ibu (AKI) - Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	- Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi - Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	- Persentase Fasyankes yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai standar - Persentase Kab/kota dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin IRL - Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	- Persentase Kabupaten Kota dengan Minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif - Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan Yang diberdayakan
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Akses Air Minum Layak
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak
PPN 4.4. : Memperkuat Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)
Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif
Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	- Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) - Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
PPN 4.5. : Meningkatkan Prestasi Olahraga	
Program pengembangan daya saing keolahragaan	Persentase atlet yang masuk pelatnas
PN 5 : Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	
PPN 5.1. : Pengembangan Hilirisasi sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	- Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/ Program Daerah RKT Tahun 2026	Indikator Program
	- Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan - Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan
PPN 5.2. : Penguatan Industri Padat Karya Berkelanjutan, Industri Dasar, dan Industri Strategis Nasional	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini
PPN 5.3. : Keberlanjutan Hilirisasi dan Industrialisasi	
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	- Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB - Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan - Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi
Program Pengendalian izin usaha industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan
Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan
PPN 5.4. : Pengembangan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total Terhadap Target Investasi
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan investor yang berinvestasi
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan
Program Pengendalian Pelaksanaan Modal	Presentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan usaha
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal
Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya
Program pengembangan ekspor	Nilai Ekspor Barang
PN 6 : Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	
PPN 6.1. : Membangun Desa dan Membangun dari Desa	
Program Administrasi Pemerintahan Desa	- Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya - Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa
Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	- Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) - Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat
Program Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/ Program Daerah RKT Tahun 2026	Indikator Program
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa
Program perencanaan kawasan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi Yang Dilaksanakan
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan
PPN 6.2. : Pemerataan Ekonomi	
Program Kawasan Permukiman	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani
Program Pengembangan Perumahan	- Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni - Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni
Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal
Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	- Konektivitas Darat - Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal
PPN 6.3. : Memberantas Kemiskinan	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Warga Miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat pendapatannya
Program Pemberdayaan Sosial	- Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin - Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar - Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi
Program Rehabilitasi Sosial	- Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya - Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
PPN 7.1. : Reformasi Politik	
Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik
Program Pendaftaran Penduduk	- Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital - Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak
Program Pencatatan Sipil	- Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/ Program Daerah RKT Tahun 2026	Indikator Program
	- Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	- Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi Dalam Satu Tahun - Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan
PPN 7.2. : Reformasi Hukum	
Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase fasilitasi pengelolaan peraturan perundang-undangan pemerintah Provinsi/Kab/Kota, penyelesaian hukum, dan penyelenggaraan HAM yang dilaksanakan
Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	- Persentase pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan - Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
PPN 7.3. : Reformasi Tata Kelola Pemerintahan	
Program Kepegawaian Daerah	- Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi - Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya - Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya - Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	- Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional - Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi - Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis - Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	- Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah - Indeks SPBE - Indeks Pemdi.
Program Penataan Organisasi	Indeks Kematangan Organisasi
PPN 7.4. : Pemberantasan Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan
PN 8: Memperkuat Penyelerasan Kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	
PPN 8.1. : Masyarakat Adil, Makmur, dan Harmonis	

Prioritas Nasional/Program Prioritas Nasional RKP 2026/ Program Daerah RKT Tahun 2026	Indikator Program
Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
PPN 8.2. : Melestarikan Budaya	
Program pengembangan kebudayaan	- Indeks Pembangunan Kebudayaan - Angka kumulatif jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan - Angka Kumulatif Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang ditetapkan
Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	- Angka Kumulatif Jumlah cagar budaya yang dilestarikan - Angka Kumulatif Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan - Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	- Angka Kumulatif Jumlah Pergelaran Seni - Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan
PPN 8.3. : Penanganan Bencana	
Program Penanggulangan Bencana	- Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana - Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana - Persentase Penanganan Pasca Bencana - Persentase Penanganan Pra Bencana
Program Penanganan Bencana	- Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran - Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Sumber:Rancangan RKP Tahun 2025, Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, diolah.

3.4. Anggaran Pendukung Kinerja Prioritas Daerah

Tema Pembangunan RKT Tahun 2026 yaitu **“Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang berkelanjutan melalui Penguatan Ketahanan Pangan, Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”** yang terdiri dari 7 (tujuh) Prioritas Daerah, yaitu:

1. Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas.
2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.
3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru.
4. Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.
5. Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan.
6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas.
7. Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, dan Berorientasi Pada Kearifan Lokal.

Berdasarkan tema dan Prioritas daerah tersebut, disusun program/kegiatan masing-masing perangkat daerah untuk Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, dengan rekapitulasi per perangkat daerah sebagai berikut:

Rekapitulasi Rencana Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

No.	Perangkat Daerah	Pagu Renja (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	2.866.880.713.669
2.	Dinas Kesehatan	493.358.555.875
	RSUD Siti Fatimah	486.671.503.945
	RS Mata	39.029.861.300
	RS Gigi dan Mulut	15.772.153.000
3.	RS. Dr. Ernaldi Bahar	45.933.756.860
4.	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	107.381.209.173
5.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang	629.044.232.327
6.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	115.167.281.327
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	42.054.212.432
8.	Dinas Sosial	44.376.686.512
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.258.537.120
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	36.304.259.124
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.951.896.860
12.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	45.872.305.661
13.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	51.920.073.911
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11.437.400.850

No.	Perangkat Daerah	Pagu Renja (Rp)
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	44.082.962.475
16.	Dinas Perhubungan	65.359.606.532
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	40.205.835.359
18.	Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	16.774.842.260
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.600.889.242
20.	Dinas Pemuda dan Olahraga	91.871.713.016
21.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	51.045.927.798
22.	Dinas Perpustakaan	21.515.608.798
23.	Dinas Kearsipan	13.042.006.830
24.	Dinas Kelautan dan Perikanan	33.997.619.060
25.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	118.329.350.730
26.	Dinas Perkebunan	30.504.539.564
27.	Dinas Kehutanan	81.179.600.210
28.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	27.727.228.447
29.	Dinas Perdagangan	18.759.606.874
30.	Dinas Perindustrian	21.285.146.797
31.	<i>Sekretariat Daerah</i>	496.715.886.053
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	89.847.231.507
	Biro Hukum dan HAM	3.618.422.840
	Biro Kesejahteraan Rakyat	44.927.173.856
	Biro Perekonomian	3.459.661.619
	Biro Administrasi Pembangunan	1.810.627.269
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	6.767.345.204
	Biro Organisasi	2.099.063.400
	Biro Umum dan Perlengkapan	300.745.395.500
	Biro Humas dan Protokol	43.440.964.858
32.	Sekretariat DPRD	425.002.108.812
33.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	42.299.524.679
34.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.073.560.221.227
35.	Badan Pendapatan Daerah	261.547.503.440
36.	Badan Kepegawaian Daerah	23.345.436.961
37.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	43.963.915.155
38.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	25.469.652.314
39.	Badan Penghubung	18.292.876.621
40.	Inspektorat	60.455.830.670
41.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	37.952.151.910
Jumlah		11.284.302.231.780

Secara total, terdapat 279 Program yang tersebar pada 53 Perangkat Daerah dengan total anggaran sebesar Rp. 11.284.302.231.780,-. Selanjutnya, total pagu anggaran untuk Prioritas Daerah dan untuk masing-masing Prioritas Daerah serta masing-masing Program Prioritas Daerah disajikan dalam tabel berikut.

Pagu Anggaran per Prioritas Daerah dan Program Prioritas Daerah Tahun 2026

No	Prioritas Daerah	Pagu (Rp.)	PD Penanggung Jawab
1.	Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan	1.137.670.000.000	1. Dinas Pendidikan 2. Badan Penelitian dan

No	Prioritas Daerah	Pagu (Rp.)	PD Penanggung Jawab
	Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas		Pengembangan Daerah 3. Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6. Dinas Pemuda dan Olahraga 7. Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi 8. Dinas Perpustakaan 9. Dinas Sosial 10. Dinas Kesehatan 11. RS. Ernaldi Bahar (OBK) 12. RS. Gigi dan Mulut (OBK) 13. RS. Mata (OBK) 14. RS. Umum Daerah Siti Fatimah (OBK)
2.	Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat	210.718.000.000	1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3. Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Dinas Pendidikan 9. Dinas Perdagangan 10. Dinas Perindustrian 11. Dinas Perkebunan 12. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.	Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru	262.919.000.000	1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Dinas Kehutanan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan 4. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan 5. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 6. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 7. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
4.	Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/ Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	2.473.050.000.000	1. Dinas dan Energi Sumber Daya Mineral 2. Dinas Komunikasi dan Informatika 3. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang 5. Dinas Pendidikan 6. Dinas Perhubungan 7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5.	Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan	4.629.280.000.000	1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Prioritas Daerah	Pagu (Rp.)	PD Penanggung Jawab
	Angka Kemiskinan		3. Dinas Pendidikan 4. Dinas Pemuda dan Olahraga 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6.	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas	1.711.690.000.000	1. Badan Kepegawaian Daerah 2. Badan Pendapatan Daerah 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Biro Administrasi Pembangunan 7. Biro Hukum 8. Biro Humas dan Protokol 9. Biro Kesejahteraan Rakyat 10. Biro Organisasi 11. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 12. Biro Pengadaan Barang dan Jasa 13. Biro Perekonomian 14. Biro Umum 15. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 16. Dinas Kearsipan 17. Dinas Kehutanan 18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 19. Dinas Komunikasi dan Informatika 20. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 21. Dinas Pemuda dan Olahraga 22. Dinas Pendidikan 23. Dinas Perhubungan 24. Dinas Perkebunan 25. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 26. Dinas Sosial 27. Inspektorat 28. Satuan Polisi Pamong Praja 29. Sekretariat DPRD
7.	Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, dan Berorientasi Pada Kearifan Lokal	105.427.000.000	1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 4. Biro Kesejahteraan Rakyat 5. Dinas Pendidikan 6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Total		10.530.754.000.000	

3.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Tabel 3.6.
Target Indikator Kinerja Utama
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target 2026
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	1.1	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,5475
		1.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,95
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan	2.1	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)	%	13,8
3.	Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak	3.1	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,453
4.	Meningkatnya Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah	4.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,8 - 6,3
		4.2	PDRB per Kapita	Rp (Juta)	94,00
		4.3	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,50
5.	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	5.1	Tingkat Inflasi	%	1,5 – 3,5
6.	Terwujudnya Keterkaitan Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan Kedaulatan Air	6.1	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	62,63
		6.2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	21,99
7.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan	7.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	68,44
		7.2	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	65,48-68,68
8.	Meningkatnya Ketahanan Pangan, Energi, dan Air	8.1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	79,79
9.	Meningkatnya Pengelolaan Bencana	9.1	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Indeks	129,78
10.	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	10.1	Tingkat Kemiskinan	%	9,07-10,07
		10.2	Rasio Gini	Indeks	0,312-0,316
11.	Meningkatnya Kesempatan Kerja Dan Berusaha	11.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,75-3,90
12.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	12.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	BB (76-77)

No	Program		Anggaran	Keterangan
1	Administrasi Pemerintahan Desa	Rp	4.228.400.000	APBD
2	Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp	145.955.759.612	APBD
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp	793.299.136	APBD
4	Hubungan Industrial	Rp	110.000.000	APBD
5	Kawasan Permukiman	Rp	5.251.928.660	APBD
6	Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp	478.000.000	APBD
7	Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	2.575.000.000	APBD
8	Kepegawaian Daerah	Rp	968.480.000	APBD
9	Kesejahteraan Rakyat	Rp	25.597.840.900	APBD
10	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Rp	95.000.000	APBD
11	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	978.174.781	APBD
12	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	306.000.000	APBD
13	Pelayanan Penanaman Modal	Rp	474.750.449	APBD
14	Pelayanan Penghubung	Rp	236.200.000	APBD
15	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	100.000.000	APBD
16	Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Rp	180.000.000	APBD
17	Pemasaran Pariwisata	Rp	1.777.320.000	APBD
18	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp	448.000.000	APBD
19	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	169.300.000	APBD
20	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp	40.000.000	APBD
21	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	3.876.800.000	APBD
22	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	785.000.000	APBD
23	Pemberdayaan Sosial	Rp	300.000.000	APBD
24	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	100.000.000	APBD
25	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp	200.000.000	APBD
26	Pembinaan Perpustakaan	Rp	918.041.202	APBD
27	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	225.000.000	APBD
28	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	430.488.015.220	APBD
29	Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp	77.818.258.363	APBD
30	Penanganan Bencana	Rp	709.000.000	APBD
31	Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	175.000.000	APBD
32	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	90.000.000	APBD
33	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp	35.000.000	APBD
34	Penanggulangan Bencana	Rp	4.466.753.450	APBD
35	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp	559.954.530	APBD
36	Penataan Bangunan Gedung	Rp	3.083.492.567	APBD
37	Penataan Desa	Rp	50.000.000	APBD
38	Penataan Organisasi	Rp	379.417.840	APBD
39	Penatagunaan Tanah	Rp	30.000.000	APBD

No	Program		Anggaran	Keterangan
40	Pencatatan Sipil	Rp	40.000.000	APBD
41	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	360.857.500	APBD
42	Pendaftaran Penduduk	Rp	40.000.000	APBD
43	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp	103.537.300	APBD
44	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp	40.000.000	APBD
45	Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Rp	3.040.000.000	APBD
46	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp	867.040.000	APBD
47	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan			APBD
48	Penempatan Tenaga Kerja	Rp	198.000.000	APBD
49	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Rp	110.000.000	APBD
50	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	1.290.000.000	APBD
51	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	80.000.000	APBD
52	Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	116.000.000	APBD
53	Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp	320.000.000	APBD
54	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp	135.000.000	APBD
55	Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	5.976.000.000	APBD
56	Pengelolaan Arsip	Rp	258.000.000	APBD
57	Pengelolaan Aspek Kegeologian	Rp	20.000.000	APBD
58	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	2.459.000.000	APBD
59	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Rp	40.000.000	APBD
60	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	994.098.865	APBD
61	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	818.536.934	APBD
62	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp	96.000.000	APBD
63	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Rp	100.000.000	APBD
64	Pengelolaan Hutan	Rp	1.972.000.000	APBD
65	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	80.000.000	APBD
66	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp	6.454.988.922	APBD
67	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp	45.000.000	APBD
68	Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Rp	158.000.000	APBD
69	Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rp	757.400.000	APBD
70	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	3.305.340.683.868	APBD
71	Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	120.800.000	APBD
72	Pengelolaan Mineral dan Batubara	Rp	232.200.000	APBD
73	Pengelolaan Pelayaran	Rp	1.467.290.000	APBD
74	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	5.972.583.920	APBD
75	Pengelolaan Pendidikan	Rp	897.419.967.954	APBD
76	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	1.305.000.000	APBD
77	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp	745.000.000	APBD

No	Program	Anggaran	Keterangan
78	Pengelolaan Perkeretaapian	Rp 192.618.600	APBD
79	Pengelolaan Permuseuman	Rp 2.898.670.960	APBD
80	Pengelolaan Persampahan	Rp 150.000.000	APBD
81	Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp 30.000.000	APBD
82	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp 100.000.000	APBD
83	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp 50.000.000	APBD
84	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 32.539.009.869	APBD
85	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 284.000.000	APBD
86	Pengelolaan Tanah Kosong	Rp 60.000.000	APBD
87	Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Rp 22.493.704.881	APBD
88	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp 186.800.000	APBD
89	Pengembangan Ekspor	Rp 54.000.000	APBD
90	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 374.000.000	APBD
91	Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 1.429.318.445	APBD
92	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 3.476.950.000	APBD
93	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 2.574.000.000	APBD
94	Pengembangan Kebudayaan	Rp 2.833.800.000	APBD
95	Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp 73.400.000	APBD
96	Pengembangan Kurikulum	Rp 119.450.000	APBD
97	Pengembangan Permukiman	Rp 2.584.661.707	APBD
98	Pengembangan Perumahan	Rp 1.304.740.000	APBD
99	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 924.668.773	APBD
100	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp 141.584.315	APBD
101	Pengembangan Umkm	Rp 900.000.000	APBD
102	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp 20.000.000	APBD
103	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 714.945.539	APBD
104	Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp 45.018.218	APBD
105	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 230.000.000	APBD
106	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 533.241.248	APBD
107	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 1.066.000.000	APBD
108	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 50.000.000	APBD
109	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 270.000.000	APBD
110	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 650.500.000	APBD
111	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp 4.500.000.000	APBD
112	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp 318.920.000	APBD
113	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 288.000.000	APBD

No	Program		Anggaran	Keterangan
114	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	12.185.774.000	APBD
115	Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp	600.000.000	APBD
116	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	1.383.055.000	APBD
117	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp	450.300.000	APBD
118	Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp	60.000.000	APBD
119	Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp	116.000.000	APBD
120	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	72.000.000	APBD
121	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	14.667.147.564	APBD
122	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	17.175.304.024	APBD
123	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	600.000.000	APBD
124	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	4.117.978.500.712	APBD
125	Penyelenggaraan Jalan	Rp	503.414.046.815	APBD
126	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	6.835.384.495	APBD
127	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	2.432.000.000	APBD
128	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	2.961.590.000	APBD
129	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	120.000.000	APBD
130	Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp	475.000.000	APBD
131	Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp	60.000.000	APBD
132	Penyuluhan Pertanian	Rp	9.650.882.000	APBD
133	Perekonomian dan Pembangunan	Rp	975.000.000	APBD
134	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp	3.559.205.387	APBD
135	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Rp	10.000.000	APBD
136	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	20.000.000	APBD
137	Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	906.695.786	APBD
138	Perencanaan Tenaga Kerja	Rp	40.000.000	APBD
139	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			APBD
140	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp	28.151.800	APBD
141	Perizinan Usaha Pertanian	Rp	35.000.000	APBD
142	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp	519.390.000	APBD
143	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp	48.000.000	APBD
144	Perlindungan Khusus Anak	Rp	930.524.000	APBD
145	Perlindungan Perempuan	Rp	333.476.000	APBD
146	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp	752.046.000	APBD

No	Program		Anggaran	Keterangan
147	Promosi Penanaman Modal	Rp	273.000.000	APBD
148	Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Rp	60.000.000	APBD
149	Rehabilitasi Sosial	Rp	8.058.120.000	APBD
150	Riset dan Inovasi Daerah	Rp	198.000.000	APBD
151	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp	400.000.000	APBD
152	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp	30.000.000	APBD
153	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp	425.071.500	APBD

BAB IV

PENUTUP

Terwujudnya pencapaian perencanaan terhadap kinerja dalam hal ini Rencana Kinerja Tahunan merupakan tujuan dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Proses pencapaian target dalam Rencana Kinerja Tahunan perlu dipantau secara rutin dan teratur sehingga target dapat diprediksi dan dievaluasi sedini mungkin. Selama ini evaluasi dimaksudkan untuk mendeteksi apabila target yang ingin dicapai masih relevan dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam melaksanakan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam peningkatan kinerja bagi seluruh Organisasi Pejabat Daerah dalam mewujudkan *Good Governance* di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah pada umumnya.